

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era reformasi saat ini, birokrasi Indonesia belum berkembang dengan baik karena masih banyak lembaga publik yang percaya bahwa rakyat lah yang membutuhkannya. Asumsi ini juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut, sehingga organisasi sektor publik yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku juga negatif bagi masyarakat umum. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hilang terhadap kinerja organisasi sektor publik dan melayani masyarakat dengan mendorong organisasi sektor publik untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* atau tata kelola yang baik agar dapat mengembalikan rasa percaya masyarakat kepada organisasi publik dan dapat meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat (Haning, 2019).

Good governance pada dasarnya adalah sebuah konsep sebagai suatu metode atau pola yang dapat terwujud jika terdapat tiga pilar pendukung yang berfungsi dengan baik yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat madani dalam suatu negara (Rustiarini, 2016). Konsep pemerintah yang baik adalah pemerintah dengan otoritas negara, di mana ada banyak prinsip yang mendukung implementasi organisasi yang tepat. *Good governance* berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mencakup banyak pedoman yang berdiri dari terbit

penyelenggaraan negara, kepentingan umum, kepentingan hukum, proporsionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Dalam hal tata kelola yang baik, ada beberapa prinsip yang dapat diimplementasi dengan baik melalui peran akuntansi.

Akuntansi sangatlah penting, dalam hal ini akuntansi adalah sistem informasi yang membantu memenuhi tugas organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam organisasi sektor publik, peran akuntansi dalam mencapai *good governance* sangat penting untuk mendukung terciptanya akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas. Akuntansi saat ini bukan hanya instrumen untuk merekam peristiwa ekonomi, sektor publik dan akuntansi swasta berkontribusi pada pemasok sumber daya dalam unit. Kontribusi akuntansi perusahaan meliputi pencapaian kontrol internal, pengujian akuntabilitas, dan penyediaan informasi yang andal dan transparan. Untuk setiap perusahaan yang membutuhkan proses akuntansi, tujuan perusahaan dapat dihitung dan dicapai dengan benar (Januari & Yafizham, 2024)

Pada perkembangan saat ini, peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* difokuskan untuk menciptakan sistem birokrasi yang handal dan transparan, khususnya bagi pembuatan laporan keuangan yang didalamnya terdapat banyak informasi penting untuk pertimbangan pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan sebagai tolak ukur kinerja. Akuntansi berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan organisasi sektor publik yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, standar yang digunakan yaitu Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan tersebut atau landasan utama dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dari organisasi sektor publik tersebut, jika laporan keuangan yang disusun oleh organisasi sektor publik tersebut dapat diandalkan dan transparansi maka dapat membantu para *stakeholder* dan pemangku kepentingan dalam menyuarakan pendapat untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dibuat oleh organisasi sektor publik tersebut akan lebih efektif dan efisiensi (Ashari, 2019).

Pemerintah merupakan bentuk dari entitas yang mempunyai fungsi dan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Dinas Sosial Brebes. Diantara fungsi-fungsi Dinas Sosial Brebes antara lain: perumusan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugasnya, pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, serta pelaksanaan fungsi lain diutus oleh Kabupaten terkait dengan tugas dan fungsinya. Untuk mendukung berjalannya fungsi dan tugas Dinas Sosial berdiri beberapa elemen-elemen penting didalam anatara lain kepada Dinas, sekretariat, bidang pemberdayaan dan rehabilitas sosial, untuk pelaksanan teknik daerah (UPTD), kelompok jabatan fungsional serta bidang perlindungan sosial dan penanganan bencana.

Dinas Sosial Kabupaten Brebes adalah salah satu organisasi sektor publik dari lembaga pemerintah negara. Dalam hal ini dinas sosial menjadi wadah bagi relawan sosial dan pekerja sosial serta penyelenggaraan urusan pemerintah dan

pelayanan umum di bidang sosial. Sebagai organisasi sektor publik, Dinas Sosial dapat melayani segala bentuk kebutuhan dan hak publik. Tujuan organisasi sektor publik bersifat nonprofit artinya bahwa pelayanan kepada publik adalah hal paling utama yang harus diutamakan dan dilaksanakan. Organisasi ini memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Tata pemerintahan yang baik memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Brebes juga harus memberikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku laporan keuangan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan, dapat diandalkan dan transparan sehingga perumusan kebijakan dan keputusan Dinas Sosial Kabupaten Brebes dapat digunakan sebagian referensi bagi para pemangku kepentingan untuk mengekspresikan aspirasinya. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik adalah untuk mendukung penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, sehingga informasi tentang laporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Brebes dapat dipertimbangkan dan transparan bagi perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Akuntansi juga berperan dalam menyediakan perhitungan untuk mencapai kegiatan yang diprogramkan untuk menyelesaikan kegiatan yang direncanakan dan berfungsi dengan baik.

Dalam penelitian ini, ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan *good governance* di Dinas Sosial Kabupaten Brebes yaitu rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan masyarakat, karena masih ada petugas menunjukkan sikap, cara berbicara atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah. Selain itu ketersediaan informasi publik kurang

memadai sehingga informasi yang mengenai masyarakat terbatas. Serta laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Brebes tidak berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga oleh akuntansi pemerintah belum mampu menunjukkan kinerja pemerintahan yang sebenarnya. Padahal informasi keuangan dan non keuangan akan digunakan oleh seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan maupun pertanggungjawaban. Selanjutnya, laporan yang disampaikan belum mampu mewujudkan *Good Governance*, sehingga peran akuntan dalam mewujudkan *Good Governance* sangat penting untuk diteliti. Langkah yang dapat di ambil untuk mencapai *Good Governance* akuntansi sektor publik memainkan peran ini adalah **ANALISIS PERAN AKUNTANSI DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES ?**

12. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka perumusanya adalah Bagaimana peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Sosial Kabupaten Brebes?

13. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tujuan penelitian yang diatas untuk mengetahui peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Sosial Kabupaten Brebes.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif serta saran yang baik, agar dapat digunakan di ranah dunia pendidikan diantaranya ;

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan pengetahuan baru bagi penulis tentang “analisis peran dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Sosial Kabupaten Brebes”.

2. Bagi Dinas Sosial

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Sosial dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana peran-peran berbagai pihak berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan sosial yang efektif dan akuntabel.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

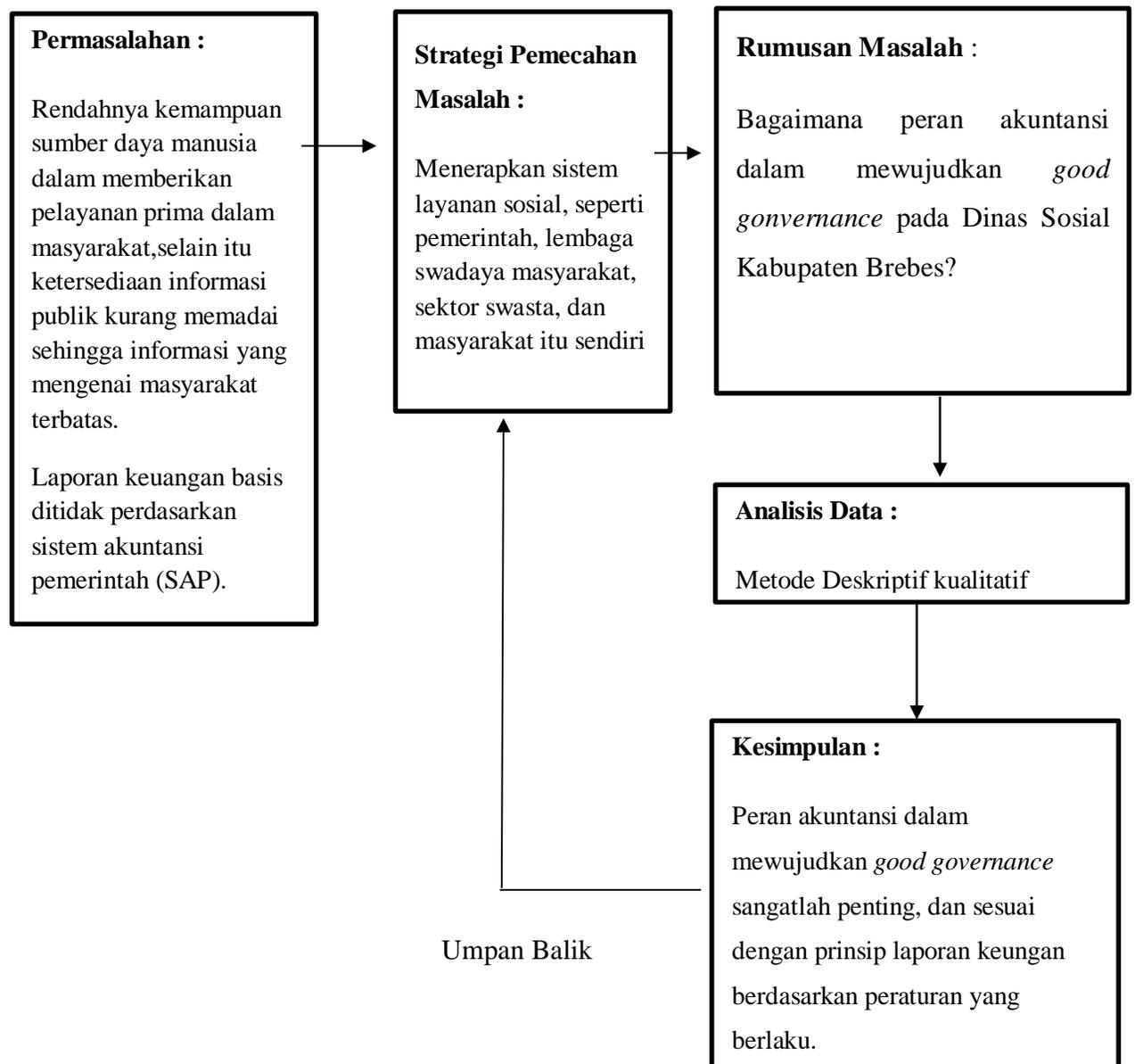
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah kepustakaan Politeknik Harapan Bersama dan dapat berguna sebagai referensi akademi bagi rekan-rekan mahasiswa maupun pembaca yang sedang melakukan penelitian pada bidang yang sama.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah menganalisis peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* yang diterapkan pada Dinas Sosial Kabupaten Brebes.

1.6 Kerangka Berpikir

Berdasarkan keterangan uraian diatas maka dapat digambarkan suatu bagian kerangka pemikiran mengenai Analisis peran akuntansi dalam mewujudkan good governance sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai Tugas Akhir ini. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

b. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan secara umum tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, kerangka berpikir, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan analisis rasio keuangan dalam menyusun penulisan Tugas Akhir.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi sumber penelitian dengan melakukan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi konsep dan operasional serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulisan menguraikan tinjauan umum yang berisi sejarah singkat dinas, stuktur oraganisasi, visi dan misi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari analisis dan pembahasan. Penulis juga memberikan saran yang diharapkan akan membantu dalam pengambilan kebijakan di waktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka ini memuat tentang daftar buku, literatur yang digunakan untuk mendukung penelitian ini secara lengkap.

c. Bagian Akhir

Bagian akhir berisikan lampiran-lampiran berupa informasi tambahan yang mendukung hasil wawancara, dokumentansi dan buku bimbingan.